

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIDAKEFEKTIFAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL
PEMELIHARAAN JALAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Diajukan Oleh :

**AHMAD ROIS AL AMIN
07011281823055**

Konsentrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Ahmad Rois Al Amin**
Tempat, tanggal lahir : **Muara Enim, 17 Oktober 2000**
NIM : **07011281823055**
Jurusan : **S1 Ilmu Administrasi Publik**
Konsentrasi : **Keuangan Publik**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Realisasi Anggaran Belanja
Modal Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Palembang Tahun 2020"**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain, kecuali yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (pembatalan predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 25 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Rois Al Amin



NIM. 07011281823055

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIDAKEFEKTIFAN REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL
PEMELIHARAAN JALAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG TAHUN 2020**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :
AHMAD ROIS AL AMIN
07011281823055

Pembimbing I	Tanda Tangan	Tanggal
1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si NIP. 196511171990031004	 _____	6 Juni 2022 _____
Pembimbing II		
2. Junaidi, S.IP., M.Si NIP. 197603092008011009	 _____	27 Mei 2022 _____

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
Nip. 19691101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIDAKEFEKTIFAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MODAL PEMELIHARAAN JALAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG TAHUN 2020**

Skripsi

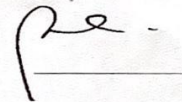
Oleh :
AHMAD ROIS AL AMIN
07011281823055

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 16 Juni 2022

Pembimbing :

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004
2. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009

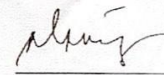
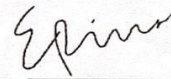
Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001
2. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002

Tanda Tangan



Mengetahui,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Dekan FISIP UNSRI,



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA DAN
FISIP

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik.”

-Sri Mulyani-

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Orang tuaku
3. Almamater kebanggaanku (Universitas Sriwijaya)
4. Keluargaku
5. Sahabat-sahabatku
6. Teman seperjuanganku (Administrasi Publik 2018)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan realisasi anggaran belanja modal pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang. Latar belakang penelitian ini adalah tingkat efektivitas realisasi pagu anggaran belanja modal pemeliharaan jalan di tahun 2020 yang kurang efektif dengan persentase pagu anggaran yang terserap sebesar 77%. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018). Konsep tersebut terdiri dari empat dimensi yaitu input, throughput, output, hingga dengan outcome. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan realisasi anggaran belanja modal pemeliharaan jalan adalah faktor input berupa adanya gap antara nilai kontrak yang ditetapkan dengan total keseluruhan pagu anggaran dan faktor outcome berupa tidak ditambahnya kegiatan lain untuk memaksimalkan penyerapan sisa pagu anggaran yang tidak digunakan.

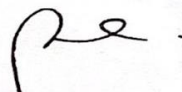
Kata kunci: Efektivitas, Realisasi, Anggaran, PUPR, Faktor

Pembimbing 1



Dr. Ardivan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004

Pembimbing 2




Junaidi, S.IP., M.Si
NIP.197603092008011009

Inderalaya, July 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001



ABSTRACT

This research aims to determine the factors that affect the ineffectiveness of absorption of the capital expenditure budget for road maintenance in the Public Works and Spatial Planning Office of Palembang. The background of this research is the level of effectiveness of the absorption of the budget ceiling in 2020 which categorized as less effective with the absorbed budget ceiling of 77%. Therefore, it is necessary to conduct research on the factors that influence it using the effectiveness concept stated by Mardiasmo (2018). The concept consists of four dimensions, namely input, throughput, output and outcome. The research method used is a qualitative research method. The results of this study indicate that the factors which affect the ineffectiveness of the absorption of the capital expenditure budget are the input factor which indicated by the gap between the stipulated contract budget and the total budget ceiling, and the outcome factor in the form of not adding other activities in order to maximize the absorption of the remaining unused budget ceiling.

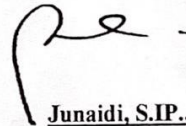
Keywords: Effectiveness, Realization, Budget, PUPR, Factor

Advisor 1



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004

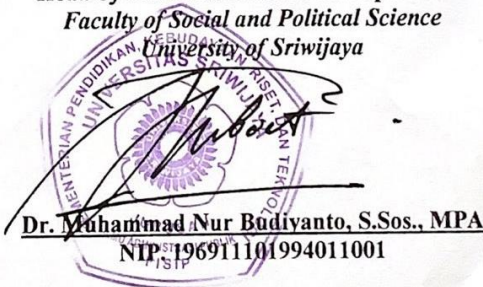
Advisor 2



Junaidi, S.IP., M.Si
NIP.197603092008011009

Inderalaya, June 2022

Head Of Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science
University of Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia, rahmat, dan kekuatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Realisasi Anggaran Belanja Modal Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang Tahun 2020”** dengan lancar. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi sekaligus menyelesaikan salah satu persyaratan dalam mendapatkan derajat sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Tahun Ajaran 2021/2022.

Dalam proses pelaksanaan pengerjaan skripsi ini tentunya tidak sedikit hambatan maupun kesulitan yang tidak terduga dan dapat berhasil dilalui dengan lancar dengan bantuan berupa doa, motivasi, bimbingan, hingga dukungan secara materil dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan seluruh ucapan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan tersebut. Dan dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih sekaligus penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan lancar dan dalam keadaan sehat wal afiat.
2. Kedua orang tua penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan baik secara materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan skripsi ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Dr. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Junaidi, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan membantu mengarahkan penulis dalam pelaksanaan hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang telah diberikan semasa perkuliahan.
9. Bapak Ir. H. Akhmad Bastari, ST., MT., IPM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
10. Ibu Uswatun Hasanah, S.E., MM selaku Kepala Sub Bidang Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
11. Epriyansah, S.IP., M.Si selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
12. Kak Sessa Dwi Putri selaku staff pegawai bagian keuangan yang telah membantu banyak dalam memberikan informasi yang berguna bagi pengerjaan skripsi
13. Para Staff Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang khususnya Bidang Keuangan yang telah banyak membantu penulis selama pengerjaan skripsi.
14. Adik-adik kandungku Muhammad Fajri Al Amin, Muhammad Faqih Al Amin, Muhammad Abdul Aziz Al Amin, dan Muhammad Ikhwanul Muslimin Al Amin yang selalu memberikan dukungan dan bantuan semasa pembuatan skripsi.

15. Teman Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri, khususnya Risma Melfina Sari, M. Rajib Akbar, Putri Ayu Choiriah, dan Melinia Putri, yang selalu memberikan saran dan motivasi dalam pengerjaan skripsi.
16. Nuriah Farahdina dan Aline Qatrunnadah sebagai cicikku dan keluargaku yang lainnya yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama pembuatan skripsi.
17. Teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya angkatan 2018 kampus Inderalaya, yang diharapkan senantiasa untuk terus maju hingga akhirnya kesuksesan menghampiri.
18. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Keuangan dan Anggaran Daerah.....	12
2. APBD	15
3. Program Pemeliharaan Jalan	20
4. Teori Efektivitas Realisasi Anggaran.....	22
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Berfikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Definisi Konsep.....	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Informan Penelitian.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Sistematika Penulisan	39
BAB IV PENDAHULUAN	40
A. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang...	40

1. Sejarah Singkat Dinas PUPR Kota Palembang.....	40
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang	43
3. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.....	44
4. Letak Geografis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.	45
5. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang	46
6. Tugas dan Fungsi Bidang	49
7. Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang	53
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Realisasi Anggaran Belanja Modal Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2020.....	55
1. Input.....	56
2. Throughput	63
3. Output.....	65
4. Outcome	74
C. Diskusi/Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	82
1. Saran Teoritis	82
2. Saran Praktis.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Anggaran Belanja Modal Pemeliharaan Jalan kota Palembang Tahun 2020	7
Tabel 2	Kriteria Efektivitas.....	23
Tabel 3	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4	Fokus Penelitian.....	34
Tabel 5	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas PUPR Kota Palembang Tahun 2020	54
Tabel 6	Tabel Pagu Anggaran Belanja Modal Pemeliharaan Jalan kota Palembang	57
Tabel 7	Tabel Nilai Kontrak Pemeliharaan Jalan kota Palembang Tahun 2020	59
Tabel 8	Tabel Sasaran Kegiatan Perealisasian Anggaran Belanja Modal Pemeliharaan Jalan Tahun 2020	64
Tabel 9	Tabel Pagu Anggaran Belanja Modal Pemeliharaan Jalan kota Palembang Tahun 2020	66
Tabel 10	Tabel Realisasi Pagu Anggaran Belanja Modal Pemeliharaan Jalan kota Palembang	67
Tabel 11	Tabel Nilai Kontrak Pemeliharaan Jalan kota Palembang Palembang Tahun 2020	71
Tabel 12	Tabel Realisasi Nilai Kontrak Pemeliharaan Jalan kota Palembang	72
Tabel 13	Tabel Sasaran Kinerja Kualitas Jalanan Kota Tahun 2020 di Dinas PUPR Kota Palembang	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Modal Pemeliharaan Jalan kota Palembang Tahun 2020	8
Gambar 2	Kerangka Berfikir	31
Gambar 3	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang.....	48
Gambar 4	Laporan Ikhtisar dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Pemeliharaan Jalan kota Palembang Tahun 2020	68
Gambar 5	Laporan Realisasi Anggaran.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur ialah salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kegiatan negara lainnya agar dapat terus berjalan secara efektif dan efisien. Karena menurut (Rutherford, 2012) infrastruktur adalah pelayan utama bagi sebuah negara untuk membantu kegiatan perekonomian masyarakat melalui penyediaan fasilitas berupa transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari berbagai negara di dunia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di negaranya termasuk penyelenggaraan infrastruktur. Salah satu bentuk upaya yang telah disepakati oleh pemerintah dari berbagai negara termasuk indonesia adalah program *Sustainable Development Goals* yang salah satu tujuan didalamnya yaitu membantu masyarakat mencapai berkelanjutan yang damai dan inklusif, memfasilitasi akses bagi keadilan terhadap semua serta membangun berbagai institusi yang inklusif, efektif, dan akuntabel di segala level, sehingga dengan berlandaskan salah satu tujuan dari program *SDGs* tersebut maka seharusnya pemerintah indonesia sebagai salah satu anggota negara yang sepakat untuk melaksanakan program *Sustainable Development Goals* dapat memberikan fasilitas berupa pembangunan infrastruktur dengan proses pembangunan yang efektif, akuntabel, dan inklusif supaya dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki populasi sekitar 270,20 juta penduduk (Data BPS tahun 2020) tentunya sangat membutuhkan infrastruktur yang masif guna menunjang segala produktivitas masyarakatnya. Ketika sebuah negara memiliki infrastruktur yang lemah maka hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di sebuah

negara sedang berjalan secara tidak efisien. Melalui proses pembangunan infrastruktur yang efektif dan jelas diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap produktivitas seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat memicu peningkatan kegiatan perekonomian di Indonesia.

Namun, tidak hanya sekedar membangun, dengan memutuskan untuk melakukan pembangunan infrastruktur maka negara pula harus siap untuk merawat atau memelihara infrastruktur yang dibangun sehingga dapat terus menjaga keberlanjutan serta kebermanfaatan infrastruktur yang dibangun. Pemeliharaan merupakan sebuah kegiatan yang dibutuhkan guna menjaga suatu sistem, aset infrastruktur, komponen, serta fasilitas agar dapat terus sesuai dengan yang didesain/direncanakan dan dibangun sebelumnya (Hudson, 1997). Di Indonesia, pemeliharaan infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam memberikan akses mobilitas yang berkualitas bagi masyarakat. Dengan adanya pemeliharaan bagi infrastruktur yang telah dibangun akan memberikan efek kepuasan bagi masyarakat yang menggunakan serta memberikan dampak yang baik pula bagi kelancaran perekonomian di Indonesia. Salah satu infrastruktur yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat dan sering kali diperhatikan adalah pemeliharaan terhadap jalan. Pemeliharaan terhadap jalan sangat perlu diperhatikan guna memberikan pengguna jalan kepuasan yang utuh. Pemeliharaan jalan merupakan suatu kegiatan dalam penanganan jalan berupa pencegahan, perbaikan, dan pemeliharaan dalam rangka mempertahankan kualitas jalan sehingga dapat terus berfungsi dengan optimal dalam memfasilitasi seluruh kegiatan lalu lintas agar umur rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 2011). Diharapkan dengan adanya pemeliharaan jalan dapat mendongkrak segala produktivitas masyarakat melalui akses mobilitas yang berkualitas.

Sesuai dengan pasal 25 PP No.34 2006 mengenai jalan. Berdasarkan statusnya jalan umum dibagi menjadi jalan kota, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan desa. Sehingga untuk kewenangan dalam penyelenggaraan jalan dipegang oleh pempus dan pemda. Pemeliharaan jalan termasuk ke dalam bagian dari penyelenggaraan jalan yang menjadi salah satu beban kerja pemerintah untuk dilaksanakan. Sehingga setiap pemerintah ditingkat pusat maupun kota/kabupaten memiliki tanggung jawab masing-masing atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan pembagian atas tanggung jawab masing-masing pemerintah.

Namun dalam pelaksanaannya pemeliharaan jalan yang dilakukan tidak serta merta hanya sekedar proyek yang dapat langsung dibangun tanpa adanya perencanaan. Pemeliharaan jalan tentunya memerlukan perencanaan kegiatan yang matang yang salah satunya adalah perencanaan anggaran. Tanpa adanya perencanaan anggaran yang matang pengerjaan pemeliharaan jalan tidak akan terlaksana secara efektif. Sumber-sumber dana yang jelas pula dibutuhkan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggaran pengerjaan pemeliharaan jalan.

Sumber anggaran pembangunan jalan didapat dari dana APBN/APBD yang sesuai dengan UU tentang APBN, UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah tingkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan. Pemerintah di tingkat Pusat juga mengalokasikan dana APBN di bidang infrastruktur terutama jalan dan jembatan mulai dari pembangunan, pemeliharaan, hingga peningkatan yang masuk ke dalam anggaran Departemen PU. Serta pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sumber dana yang didapat adalah dari alokasi APBD. Akan tetapi jika Pemerintah Daerah tidak mampu untuk melakukan pembiayaan penyelenggaraan jalan secara keseluruhan maka pembiayaan akan dibantu oleh pemerintah pusat sesuai pasal 85 ayat 2 dan 3 PP No. 34 Th.2006.

Indonesia yang merupakan Negara kesatuan tentunya menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahnya melalui kebijakan yang berupa pemberian keleluasaan maupun kesempatan bagi setiap daerah dalam rangka melakukan penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 32 Th. 2004 mengenai Pemda selaku sebuah keluaran peraturan di era reformasi saat ini, sudah memberikan tanda bahwa telah diawalinya otonomi yang nyata, luas dan beresponsibilitas melalui kewenangan sepenuhnya bagi daerah kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota tersebut mempunyai kedudukan sebagai sebuah daerah otonom yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola serta memperhatikan segala kepentingan pemerintah maupun masyarakat. Selain itu Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah pemanfaatan serta penggunaan anggaran daerah selalu dilakukan hingga dengan pendapatan daerah yang telah dipersiapkan melalui APBD tahunan dalam rangka melakukan peningkatan pelayanan publik serta memajukan perekonomian di suatu daerah. Selain itu, anggaran pula memiliki peranan penting yang merupakan sebuah rencana kegiatan yang telah disusun secara sistematis guna menunjang segala kegiatan belanja daerah agar dapat terlaksana. Sehingga dalam penggunaannya, anggaran dituntut untuk dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar dapat menghasilkan keluaran yang maksimal.

Alat perencanaan sebagai fungsi anggaran merupakan sebuah sasaran yang akan dituju oleh pemda, sedangkan sebagai alat pengendalian, anggaran adalah pengalokasian dana awal dalam organisasi sektor publik yang telah dilakukan persetujuan oleh legislatif agar digunakan. adanya tingkat efektivitas anggaran yang turun sering muncul diakibatkan sasaran tujuan di dalam PAD tidak sinkron dengan sasaran tujuan yang sudah diputuskan sebelumnya serta dapat pula dikarenakan adanya beberapa beberapa program/kegiatan yang tidak terealisasi ataupun dibatalkan (Azmi & Jusmani, 2017).

Pada dasarnya penganggaran yang dilakukan merupakan modal untuk melakukan seluruh kegiatan belanja bagi Satuan Kerja dan Perangkat Daerah. Belanja merupakan semua pengeluaran dana yang dilaksanakan dari kas negara maupun daerah dengan melakukan pengurangan modal dana lancar dalam lama tahun anggaran yang ditetapkan dan tidak dapat dilakukan pengembalian oleh organisasi publik. Selain itu, belanja daerah merupakan seluruh kegiatan pengeluaran anggaran dalam kas sebuah daerah dalam waktu tahun anggaran yang telah diputuskan, dan didalamnya adalah belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang telah ditetapkan dalam anggaran yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan yang didalamnya termasuk belanja untuk kepegawaian, belanja untuk barang dan jasa pelaksanaan kegiatan, dan belanja modal.

Dalam pelaksanaannya, anggaran yang salah satunya untuk kegiatan belanja modal merupakan bentuk nilai target yang perlu dicapai dalam rangka melakukan pelaksanaan realisasi anggaran tersebut. Sehingga pelaksanaan realisasi anggaran seharusnya dapat dilaksanakan secara efektif guna untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam pelaksanaan anggaran tentunya memiliki dampak yang besar terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Efektivitas menunjukkan terjadinya pencapaian pelaksanaan anggaran sesuai dengan budget yang telah ditetapkan dengan melakukan perbandingan antara realisasi dan target yang sudah diputuskan. Dan secara menyeluruh efektivitas ialah pengukuran bagi realisasi dari sebuah kegiatan yang salah satunya anggaran dalam meraih tujuan yang dimiliki. Dalam hal penyelenggaraan belanja anggaran tentunya perlu dilakukan pengukuran efektivitas dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan jelas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah ialah seluruh kegiatan yang didalamnya termasuk

pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, penganggaran, pelaporan, responsibilitas, dan pengawasan terhadap keuangan daerah. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif, efisien, tertib, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, serta taat pula pada peraturan perundang-undangan. Realisasi atau pelaksanaan anggaran merupakan salah satu kegiatan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 2019 dan menurut PP Nomor 12 Pasal 3 Ayat 1 salah satu aspek yang harus dicapai dalam pengelolaan daerah adalah efektif, sehingga pelaksanaan anggaran harus dilakukan secara efektif dengan mengacu kepada kedua pasal dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut.

Anggaran Pemeliharaan jalan merupakan salah satu bentuk dari belanja modal yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang realisasi anggaran pemeliharaan jalan dilaksanakan dengan mengacu pada Pagu Anggaran yang telah dibuat dan akan dijadikan sebagai modal pelaksanaan pemeliharaan jalan. Berikut nilai Pagu Anggaran dan Nilai Penyerapan Anggaran belanja modal pemeliharaan jalan di kota Palembang tahun 2020 yang terbagi ke dalam 18 kecamatan. Dan dengan berdasarkan pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2020 yang dirincikan per kecamatan menjelaskan total keseluruhan realisasi anggaran belanja modal pekerjaan pemeliharaan jalan tahun 2020 di kota Palembang. Total keseluruhan pagu anggaran tahun 2020 yaitu sebesar Rp329.461.267.287,- yang terbagi lagi ke dalam 18 kecamatan di kota Palembang, sedangkan **jumlah** total pagu anggaran seluruh kecamatan di kota Palembang yang terealisasi yaitu sebesar Rp254.253.673.028,-. Tentunya dengan adanya gap yang tidak sedikit yang dapat dilihat dari jumlah pagu anggaran dan realisasi anggaran menunjukkan

terjadinya kesenjangan antara kedua hal yang saling berkaitan tersebut. Nilai Pagu Anggaran dan Nilai Penyerapan Anggaran dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1
Tabel Penyerapan Anggaran Belanja Modal Pemeliharaan Jalan kota Palembang Tahun 2020

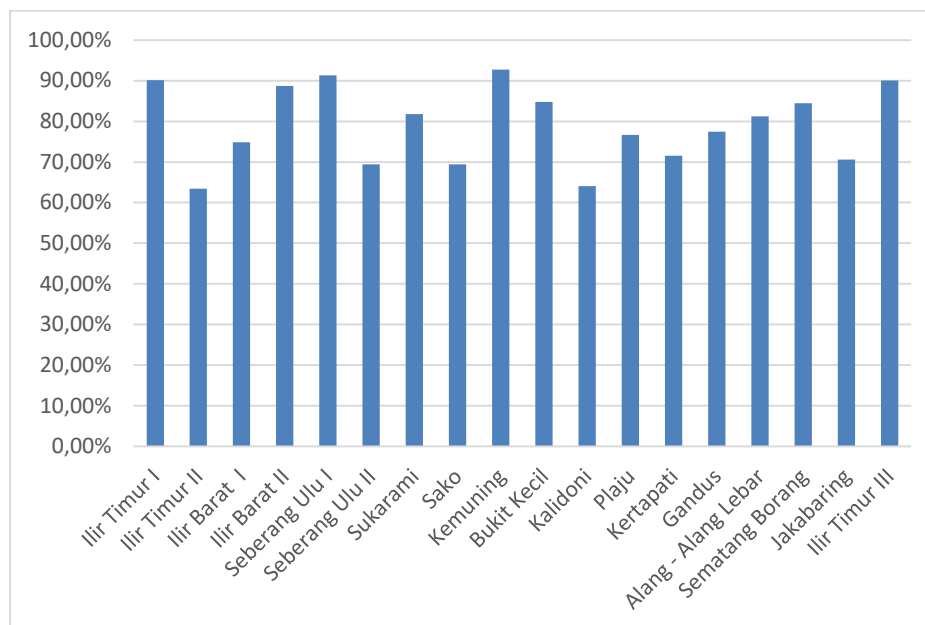
No	Kecamatan	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran
1	Iilir Timur I	Rp 11.246.484.600,-	Rp10.139.092.700,-
2	Iilir Timur II	Rp21.506.738.050,-	Rp13.646.233.050,-
3	Iilir Barat I	Rp34.576.862.265,-	Rp25.891.110.365,-
4	Iilir Barat II	Rp7.003.347.100,-	Rp6.213.780.950,-
5	Seberang Ulu I	Rp3.642.511.550,-	Rp3.326.486.250,-
6	Seberang Ulu II	Rp6.833.331.800,-	Rp4.741.165.950,-
7	Sukarami	Rp55.521.818.678,-	Rp45.402.255.147,-
8	Sako	Rp14.728.285.662,-	Rp10.221.531.862,-
9	Kemuning	Rp8.133.858.537,-	Rp7.543.520.537,-
10	Bukit Kecil	Rp4.907.899.200,-	Rp4.162.194.080,-
11	Kalidoni	Rp15.521.265.923,-	Rp9.946.508.773,-
12	Plaju	Rp15.916.899.118,-	Rp12.201.042.968,-
13	Kertapati	Rp32.422.814.350,-	Rp23.193.181.830,-
14	Gandus	Rp16.783.276.400,-	Rp12.998.073.107,-
15	Alang - Alang Lebar	Rp35.471.987.800,-	Rp28.820.260.855,-
16	Sematang Borang	Rp17.179.219.504,-	Rp14.512.748.394,-
17	Jakabaring	Rp21.810.444.450,-	Rp15.393.477.010,-
18	Iilir Timur III	Rp6.551.222.300,-	Rp5.901.009.200,-
	TOTAL	Rp329.461.267.287,-	Rp254.253.673.028,-

Sumber: Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2020 (Diolah , 2022)

Kesenjangan yang dapat dilihat diantara kedua nilai Pagu Anggaran dan Nilai Realisasi Anggaran tersebut dapat dibuktikan pula melalui persentase sisa anggaran yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus efektivitas Menurut (Mashun, 2009), yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus penghitungan efektivitas yang dikemukakan oleh (Mashun, 2009) tersebut didapatkan penyerapan anggaran belanja modal pemeliharaan jalan di kota Palembang yang dirincikan kedalam 18 kecamatan di kota Palembang yang dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar I Persentase penyerapan anggaran belanja modal pemeliharaan jalan kota Palembang tahun 2020 (Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2020, 2022)

keseluruhan anggaran yang terealisasi pada pekerjaan pemeliharaan jalan di kota Palembang yaitu sebesar 77% atau sebesar Rp254.253.673.028,-, sehingga jumlah pagu anggaran yang tidak sesuai target adalah sebesar Rp75.207.594.259,- dari total keseluruhan pagu anggaran tahun 2020 yaitu sebesar Rp329.461.267.287,-. Dan dengan mengacu kepada Kepmendagri No. 690. 900-327 Tahun 1996 tentang kriteria efektivitas, tingkat efektivitas dalam realisasi anggaran pada pekerjaan pemeliharaan jalan di kota Palembang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini tergolong kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang maksimalnya pelaksanaan realisasi anggaran atau dapat pula digambarkan sebagai *output* atau keluaran yang masih belum dapat dihasilkan secara efektif. Belum maksimalnya *output* yang dihasilkan ini tentu dapat

disebabkan oleh berbagai faktor realisasi yang telah dilakukan ketika menuju terealisasinya anggaran.

Topik penelitian yang membahas mengenai anggaran belanja modal menjadi sebuah kajian yang menarik untuk sebagian peneliti dan mengkajinya dari berbagai sudut pandang yang beragam. Ada yang melihatnya dari Aspek pengelolaannya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Akbar (2022). Ada juga yang melihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif seperti yang dilakukan oleh (Fuad et al., 2018), serta ada pula yang melihatnya dari sudut pandang perbandingan belanja modal dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif seperti yang dilakukan oleh (Lempoy, 2020). Hal ini membuktikan bahwa topik mengenai anggaran belanja modal ini cukup menarik untuk dilakukan penelitian.

Bagi kalangan peneliti Administrasi publik, kajian efektivitas realisasi anggaran belanja modal juga sudah banyak dengan berbagai macam fokus kajian yang berbeda. Ada yang melihatnya dari Aspek penyerapan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik analisis data *description analysis* seperti yang dilakukan oleh (Prasetyo & Nugraheni, 2020) dan Amaral & Wiagustini, (2019), ada yang melihat dari aspek pelaksanaan yang diukur dengan menggunakan alat rasio efektifitas anggaran dan melakukan perbandingan kedua rasio dengan standar anggaran yang ada (Tangdialla & Datu, 2021), ada pula yang melihatnya dari aspek kinerja dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mahsun (2009), Laila et al. (2019) serta ada pula yang melihat dari aspek hambatan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif (Sahori & Tuswoyo, 2021).

Jika dilihat penelitian efektivitas anggaran belanja modal dari aspek realisasinya sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang berhubungan namun kebanyakan penelitian yang dilakukan hanya menggunakan teori efektivitas yang

dikemukakan Mahsun (Analisis Sektor Publik, 2009) yang hanya sekedar melakukan pembagian antara realisasi dan target anggaran seperti penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rahayu & Ramdani (2021), Laila et al. (2019), dan Kurniasari et al. (2018). Disisi lain penelitian efektivitas yang melihat dari sisi faktor-faktor yang mempengaruhi dengan menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) masih jarang digunakan sehingga hal inilah yang memotivasi untuk dilakukannya penelitian ini yang diharapkan dapat menjawab mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan realisasi anggaran belanja modal pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Setelah mendapatkan latar belakang permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan, maka rumusan masalah yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu “apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan realisasi anggaran belanja modal pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang tahun 2020?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan realisasi anggaran belanja modal pemeliharaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat pada penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi empiris dengan memberikan tambahan informasi dan kajian khususnya yang berkenaan dengan efektivitas realisasi anggaran belanja. Penelitian ini pula diharapkan bisa menjadi sebuah dasar pemikiran baru bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan ataupun sejenis dengan penelitian ini serta dapat juga berguna bagi pengembangan konsep ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi sekaligus masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang terkait keefektifan realisasi anggaran sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam perealisasi anggaran belanja.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku

- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rutherford, D. (2012). *The Routledge Dictionary of Economics*. New York: Routledge.
- Hudson, W. H. (1997). *Infrastructure Management*. New York: McGraw.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasan, A. (2008). *Marketing*. Yogyakarta: Media Utama.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Saldana, & Huberman, M. &. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- Rahayu, F. D., & Ramdani, D. (2021). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Setda Kota Magelang Bagian Administrasi Pembangunan. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 1-10.
- Sahori, & Tuswoyo. (2021). Analisis Efektivitas Anggaran pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 36-44.
- Tangdialla, R., & Datu, R. (2021). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja (BAPPEDA) Toraja Utara. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)*, 117-134.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019 . *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 2614-1930.
- Amaral, J., & Wiagustini, L. P. (2019). Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Ministerio Das Obras Publicas Timor Leste. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 95-136.

- Shofwah, A. L., & Handayani, N. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7.
- Sari, R. K., Masrunik, E., Huda, A. M., & Elvianita, D. (2018). Efektivitas Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2017. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 69-76.
- Yunita, N., & Putra, I. S. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Guna Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Porbudpar Kota Blitar . *Jurnal PETA (Penelitian Teori & Terapan Akuntansi)*, 95-108.
- Sari, N. W., Sariana, K., Utami, K. M., & Dewi, I. A. (2017). Analisis Realisasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perrangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 2.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulana, I. A., Endang, Masitoh, & Dewi, D. R. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 12-19.
- Suparmoko. (2011). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE.
- Widiyati, W. (2014). *Ekonomi Pemerintahan. Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Prasetya, G. E. (2010). *Peyusunan dan Analisis Laporan Kauangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Azmi, & Jusmani. (2017). Analisis Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 2.
- Mashun, M. (2009). *Analisis Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Akbar, A. M., Burhanuddin, & Guasmin. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 438-447.
- Sinjar, A., Burhanuddin, & Yusuf, D. (2020). Analisis Efisiensi Anggaran Pemeliharaan Jalan Wilayah Kota Palu pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 338-346.

Lempoy, O. P. (2020). Analisis Perbandingan Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Periode 2011-2014 dan Periode 2016-2019. *Jurnal EMBA*, 859-902.

Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit ANDI.

Ulandari, V., Akram, & Santoso, B. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Administrasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 1577-1591.

Jurnal

Akbar, A. M. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah An Analisis of Capital Expenditure Fund Management at Human Settlements and Water Resources Office , Central Sulawesi Province. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 03, 438–447.

Amaral, J., Wagustini L. P. (2019). Efektivitas Penyerapan Anggaran Pada Ministério Das Obras Públicas Timor Leste. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2, 95. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i02.p01>

Dwi Rahayu, F., & Ramdani, D. (2021). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Setda Kota Magelang Bagian Administrasi Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5(1), 129. <https://doi.org/10.29408/jpek.v5i1.2740>

Fuad, S. I., Saleh, M., & Effendi, A. S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pembangunan. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 13(1), 75. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2443>

Kurniasari, R., Masrunik, E., Huda, A. M., & Elvianita, D. (2018). Efektivitas Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2017. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 69. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.209>

Laila, A., Noor, R., & Handayani, N. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(7), 1–15.

Perbandingan, O. P. L., Modal, B., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2019). PERIODE 2011-2014 DAN PERIODE 2016-2019 COMPARATIVE ANALYSIS OF MANADO CITY GOVERNMENT CAPITAL EXPENDITURE PERIOD 2011-2014 AND PERIOD 2016-2019 *Jurnal EMBA Vol . 8 No . 4 Oktober 2020 , Hal . 895-902 O . P . Lempoy . Perbandingan Belanja Modal Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (EMBA)*, 8(4), 895–902.

Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode

2015 – 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 1–10.

Sahroni, T. (2021). Analisis Efektivitas Anggaran pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017 – 2019. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), 36–44.

Sains, J. K., Sinjar, A., Yusuf, D., Ekonomi, F., & Palu, U. M. (2022). Analisis Efisiensi Anggaran Pemeliharaan Jalan Wilayah Kota Palu pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Budget Efficiency Analysis of the Road Maintenance of Palu City in the Department of Bina Marga and Regional Spatial. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 03, 338–346.

Tangdialla, R., & Datu, R. (2021). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja BAPPEDA Toraja Utara. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan ...*, 2(1), 117–134. <http://www.journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jesit/article/view/1284%0Ahttps://www.journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jesit/article/download/1284/1015>

Yunita, N., & Putra, I. S. (2018). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Guna Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas PORBUDPAR Kota Blitar. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), 95–108. <https://doi.org/10.51289/peta.v3i1.337>

Rujukan Peraturan

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang membahas mengenai Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 10 tentang Pemeliharaan jalan

Peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006 pasal 97 ayat 1 tentang belanja langsung

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690. 900-327 Tahun 1996 tentang kriteria efektivitas

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 2 tentang pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 1 tentang pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Pemerintah No.34 2006 pasal 25 tentang pengelompokkan jalan umum menurut statusnya

Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 pasal 85 ayat 2 dan 3 tentang pembiayaan penyelenggaraan jalan

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Internet

Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. Populasi Penduduk Indonesia SP2020 (<https://www.bps.go.id/news> diakses 9 Januari 2021).

United Nations, Department of Economic and Social Affairs. 2018. Sustainable Development Goals (SDGs) (<https://sdgs.un.org/goals> diakses 30 Januari 2022).